

RELASI POLITIK DENGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Ahmad

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

Email: Asirahmad58@yahoo.co.id

Abstrak

Upaya mengubah umat manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam hanya dapat dilakukan dengan dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan sebuah proses untuk mendekatkan umat manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan tingkat kemampuannya yang dipandu oleh ideologi dan akidah Islam. Sebagaimana tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang berkepribadian Islami serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan, sehingga pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap dan perilaku atau tidak. Dalam kerangka ini, diperlukan monitoring yang intensif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah terhadap pola dan perilaku peserta didik, sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi Islam berkenaan dengan kehidupan dan nilai-nilainya.

Kata kunci: Politik, Pendidikan Islam

Abstract

Efforts to transform humanity with knowledge of attitudes and behaviors that conform to Islamic values or ideology can only be done with education. Thus, Islamic education is a process to bring humanity closer to the level of its perfection and to develop the level of its ability which is guided by Islamic ideology and aqidah. As the goal of Islamic education is to create human beings who are Islamic and soulful in accordance with the spirit and breath of Islam. Methodology that is not oriented towards the achievement of these goals will certainly be avoided, so that Islamic education is not merely transfer of knowledge, but pay attention to whether the given science can change attitudes and behavior or not. Within this framework, intensive monitoring by all levels of society, including the government on the patterns and behavior of learners, to what extent they are bound by the Islamic conception of life and values.

Keywords: Politics, Islamic Education

Pendahuluan

Dalam dunia politik, yang sudah sedemikian maju pesat seperti saat ini, yang kemudian ditandai dengan munculnya berbagai problematika dalam segala bidang yang hanya mampu mengulang-ulangi praktek pendidikan yang datang atau dipengaruhi sepenuhnya oleh Barat.¹ Para cendekiawan atau intelektual muslim yang terkemuka seperti Syed Muhammad Naquib al Attas mengemukakan bahwa saluran yang melancarkan penyelundupan paham-paham asing itu adalah sistem pembelajaran dan pendidikan yang dikuatkan oleh kekuatan politik, yang dibantu oleh golongan para guru dan golongan penulis yang menyamakan paham itu sebagai hasil sastra.²

Jika diibaratkan dengan benda, maka antara dunia pendidikan dan politik, baik dalam bentuk politik praktis maupun politik secara teoritis secara gamblang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena politik itu sendiri yang dapat melahirkan sebuah kebijakan. Maju atau mundurnya sebuah pendidikan dalam suatu Negara, begitu juga sebaliknya, *output* pendidikan yang berhasil dalam mencetak generasi penerus

bangsa yang jujur, amanah dan dapat dipercaya, maka akan melahirkan pelaku-pelaku politik atau politisi yang juga berkualitas, sehingga imbasnya adalah tidak akan ada lagi yang namanya korupsi, kolusi maupun nepotisme yang saat ini meraja lela di Negeri ini. Dengan demikian, relasi pendidikan dengan kebijakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah relasi yang sama-sama mempunyai imbas pada kedua pihak, baik imbas dalam artian yang positif ataupun dalam bentuk imbas yang negative.

1. Peran politik dan Negara terhadap pendidikan Islam

Politik memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, setiap perkembangan pendidikan diawasi oleh pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 59 ayat 1, berkenaan dengan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal tersebut pemda melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan.

Beberapa lembaga pendidikan, seperti sekolah umum dan sekolah yang berbasis ke-Islaman, mereka telah diberikan Bantuan yang berupa Bantuan Operasional Sekolah atau yang disebut dengan BOS sejak tahun 2009 kepada sekolah tingkat SD/MI/ sederajat, maupun

¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Bunga Rampai Syariat Islam*, (Jakarta: HTI, 2010).

² An Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizhâm al-Islâm*. t.tp.: t.p.

SMP/MTs/ sederajat.³ Demikian juga dengan pendidikan pesantren dengan label pondok pesantren modern yang memiliki alumni di kursi jabatan elit politik kalangan atas, bantuan dari pemerintah untuk membangun gedung dan peralatan lainnya sangatlah mudah. Pengakuan dari masyarakatpun cukup baik terhadap pendidikan yang diajarkan oleh pondok pesantren yang dapat meluluskan alumninya menjadi orang-orang besar ditanah air.

Berbeda dengan pondok pesantren atau sekolah Islam yang tidak memiliki hubungan antara pejabat-pejabat tinggi ditanah air. Jika ada salah satu pesantren atau sekolah Islam yang tidak berkembang merupakan salah satu efek dari kebijakan politik pemerintahan yang dalam tanda kutib masih membutuhkan beberapa pembenahan di berbagai sisi.

Politik menjadi ujung tombak dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, pada masa sebelum orde baru, banyak sekolah yang berlabel Islam atas perjuangan organisasi sosial masyarakat, Misalnya seperti Nahdatul Ulama yang memiliki lembaga pendidikan sekolah dasar Nahdatul ulama, Muhammadiyah yang memiliki lembaga pendidikan tingkat

SD sampai dengan Perguruan Tinggi dan beberapa organisasi politik lainnya yang mempunyai label Islam.

Politik bangsa ini telah merambah keberbagai bidang ditanah air salah satunya adalah bidang pendidikan Islam melalui beberapa organisasi partai Islam yang mengajarkan akan cinta tanah air dengan landasan sebuah hadist tentang Negara. Jadi cinta tanah air dalam meperjuangkannya melawan penjajahan adalah sebagai dari iman.

Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia merupakan salah satu lambang ke-Negaraan yang sudah mempunyai aspek-aspek ketuhanan terkhusus untuk pendidikan islam, dimana pendidikan islam ini harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Esa tidak ada tuhan selain Allah. Iman dan takwa memiliki unsur terpenting dalam tujuan pendidikan agama Islam.

Seseorang akan menjadi baik jika mengerti dan paham dengan agama. Hal ini pendidikan Islam menjadi peran penting untuk merubah perilaku peserta didik melalui lembaga pendidikan pesantren yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah untuk membentuk manusia yang berakal budi pekerti yang baik, karena lembaga ini selain mengajarkan aspek kognitif juga mendidik peserta didik untuk menjadi manusia yang bertakwa

³ Panduan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010), hlm, 59.

atau merambah pada aspek afektif dan psikomotorik.

2. Formulasi hubungan politik dengan pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara, meskipun pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat karena pendidikan dan politik bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi.

Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat sehingga membawa dampak yang begitu besar pada karakteristik pendidikan. Artinya ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Gambaran yang jelas tentang keterkaitan antara pendidikan dan politik dapat kita telusuri di dalam dunia Islam, dimana sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan sebagai upaya untuk

memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Pendidikan pada masa Islam klasik dengan hasil kesimpulan dalam sejarah perkembangan Islam, Institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu konstilasi politik, peranan yang dimainkan oleh masjid dan madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Disisi yang lain, ketergantungan pada uluran tangan para penguasa secara eonomis, membuat lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan politik, menurut Rasyid adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad.⁴ Dia menyimpulkan dari

⁴ Madrasah Nizhamiyah didirikan oleh penguasa Bani Saljuk, Nizham Al-Mulk, seorang perdana menteri dari Alp Arselan dan Malik Syah Pada tahun 457 H, setengah abad setelah berdirinya Universitas Al-Azhar di Cairo. Bani Saljuk terkenal sangat fanatik terhadap madzhab sunni. Madrasah Nizhamiyah didirikan di setiap kota di Irak dan Khurasan, untuk mengikis paham syi'ah Zaidiyah yang dikembangkan oleh dinasti Buwaih sebelumnya dan dalam rangka menghadang paham islamiyah yang dipropagandakan oelh dinasti Fatimiyah di Mesir. Selain itu, Tujuan pendirian madrasah oleh Nizham Al-Mulk adalah untuk mencetak birokrat-birokrat yang akan menduduki jabatan kenegaraan, atau paling tidak, melalui lembaga tersebut akan lahir warga negara yang mengerti akan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Singkat kata, madrasah Nizhamiyah merupakan instrumen kebijakan politik yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menanamkan

analisis terhadap kasus madrasah Nizhamiyah sebagaimana berikut: “Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan, tanpa otoritas politik, syari’at Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan, kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam, pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syari’at, umat tidak akan mengerti syari’at tanpa adanya pendidikan, bila politik (kekuasaan) mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan lewat arus bawah”.

Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam Islam tampak sedemikian erat. Perkembangan kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, adalah “menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan

syari’at. Syari’at tidak akan berjalan bila umat tidak memahami ajaran Islam”.⁵

Selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi Negara, Sjalabi mencatat bahwa Khalifah Al-Makmun memolitisasi majelis *munazharah* dalam rangka menyebarkan paham Mu’tazilah sebagai mazab resmi negara waktu itu melalui peristiwa Inquisisi, yaitu penyelidikan atau interogasi (*Al-Mihna*) terhadap para ulama dan pejabat penting.⁶ Kepada mereka ditanyakan apakah Al-

⁵ Pada periode Makkah, rumah Arqam Ibn Abi Arqam berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dalam bentuk yang sederhana, dimana nabi mengajar sahabat-sahabatnya. Pada periode Madinah, aktivitas pendidikan berpusat di masjid-masjid. Pada periode tersebut Khalifah Umar Ibn Khattab memerintahkan Abu Musa Al-Asy’ari agar setiap suku mendirikan masjid untuk memperluas jaringan pendidikan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah, baik yang di Damaskus maupun di Spanyol berperan penting dalam membangun cakrawala pendidikan Islam (Sjalabi, 1973: 94).

⁶ Bila ditinjau dari sisi aqidah, inquisisi adalah usaha pemurnian pandangan masyarakat. Bagi golongan Mu’tazilah menganggap bahwa Al-Qur’an itu Qadim adalah kafir karena dengan demikian itu seseorang telah menjadikan yang Qadim ada dua. Kekufuran harus dihapus dari pandangan orang Islam. Pejabat negara dan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur’an Qadim harus disingkirkan, karena mereka adalah termasuk orang kafir (Rasyid, 1994: 18).

dktrin kenegaraan yang memperkuat kerajaan. Patronase Nizam Al-Mulk tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan pengadaan sarana, tetapi juga kurikulum dan jabatan “professorship”, guru besar (Rasyid, 1994: 7-8).

Qur'an itu Qadim atau Hadis Melalui inquisisi para ulama, pilar penopang lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu'tazilah, ideologi resmi penguasa.

Pendidikan Islam tidak hanya berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta politik, tetapi juga para ulama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum. Seiring dengan perluasan peta politik dan penambahan pemeluk Islam, juga terjadi perkembangan lembaga (intsitusi) pendidikan dalam jumlah maupun varietasnya. Di dalam sejarah Islam tercatat bahwa pusat pendidikan yang pertama kali muncul adalah rumah Arqam Ibn Abi Arqam, yakni ketika Nabi berada di Makkah.⁷ Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sudah lebih

variatif dengan lahirnya Kuttab⁸ dan dijadikan rumah-rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar.

Menurut Rasyid menyimpulkan bahwa para penguasa Islam senantiasa terlibat langsung dalam persoalan pendidikan. *Pertama*, karena Islam adalah agama yang totaliter *jam'i*, mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim mulai dari makan dan minum, tatacara berumah tangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadat semuanya diatur oleh syari'at. *Kedua*, karena motivasi politik, sebab politik dan Agama sulit untuk dipisahkan dalam Islam.

Hubungan pendidikan dan politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato⁹ Sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di atas kelompok elit yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas

⁷ Pada periode Makkah pusat-pusat pendidikan difokuskan di masjid-masjid. Masjid yang pertamakali didirikan adalah masjid Quba. Di masjid ini diadakan lingkaran-lingkaran belajar (*halaqah*) sebagaimana di masjid Nabi di Mirbad Madinah. Untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran di masjid ini, lalu dibangunlah *al-Suffah* (semacam beranda). Di *Al-Suffah* ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat dan melatih beberapa orang diantara mereka untuk menjadi guru yang mampu mengajar beberapa pelajaran yang berlainan. Diantara para sahabat yang dilatih di *Al-Suffah* tersebut ialah Abu Abdullah Ibnu Rowahah, Ubadah Ibnu Shamit, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah" (Rasyid, 1994: 25).

⁸ *Kuttab*, menurut Al-Thibawi, merupakan fenomena yang berkembang pada awal abad ke-8 M di penghujung pemerintahan Bani Umayyah. Kuttab ini berfungsi sebagai pusat pendidikan anak-anak kecil, didirikan untuk menghindari mereka dari mengotori masjid (Dalam Rasyid, 1994: 26).

⁹ al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996), 103.

kependidikan dan aktifitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan.

Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitude*), masalah pengangguran (*unemployment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligentsia*).

Relasi pendidikan dengan pendidikan tersebut dapat berbentuk sebagaimana berikut:

1. Pendidikan dan kelompok

Dalam banyak kasus, hubungan kekuasaan antar berbagai kelompok masyarakat banyak dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan intensitas respons mereka terhadap pendidikan. Ketika bangsa Indonesia baru merdeka, partai politik dan lembaga kenegaraan banyak dikuasai oleh tokoh sekuler berpendidikan Barat yang tergabung dalam organisasi Nasionalis, seperti Boedi Oetomo dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Kelompok masyarakat yang tertekan dan menjadi korban imperialisme budaya cenderung menginginkan sistem pendidikan

terpisah, dalam rangka melindungi identitas kelompok mereka. Inilah yang terjadi pada sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia, khususnya pesantren. Di bawah tekanan kelompok bahasa dan agama minoritas, beberapa pemerintah memenuhi tuntutan mereka, sementara yang lainnya memaksakan penyeragaman sistem pendidikan dengan harapan dapat mengeliminasi bahaya laten perpecahan sosial.

2. Pendidikan dan dunia kerja

Pendidikan dan dunia kerja memiliki hubungan yang sangat kompleks. Salah satu inovasi paling radikal yang disebabkan oleh pendidikan adalah meningkatnya ambisi pribadi. Pendidikanlah yang membuat jutaan anak petani di negara-negara berkembang menilai rendah profesi sebagai petani dan bertransmigrasi ke daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan yang dinilai lebih menjanjikan, baik dari segi ekonomi maupun prestise sosial.

Masalah pengangguran menjadi ujian penting bagi pemerintah di negara berkembang. Mereka dituntut untuk mengimbangi keberhasilan pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja. Di satu pihak, ekspansi pendidikan turut serta melahirkan instabilitas karena

pendidikan melahirkan tuntutan yang seringkali tidak dapat dijawab oleh sistem politik. Di pihak lain, tersedianya pendidikan yang cukup diberbagai jenjang adalah persyaratan yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik.

Hanya dengan sumber daya manusia yang terlatih dan kesempatan kerja yang memadai pemerintah dan birokrasinya dapat memenuhi tuntutan publik, dan hanya publik yang terdidik yang dapat diminta turut serta bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa (*nation-building*).

Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua dataran, baik pada dataran filosofis maupun pada dataran kebijakan. Misalnya filsafat pendidikan di suatu negara seringkali merupakan refleksi prinsip ideologis yang diadopsi oleh negara tersebut. Di Indonesia, misalnya, Filsafat Pendidikan Nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dataran kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara dengan

persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintah tersebut.

Kebijakan pendidikan suatu pemerintahan merefleksikan dan terkadang merusak pandangannya terhadap masyarakat atau keyakinan politik. Sebagai fungsi pemerintahan, formulasi kebijakan secara esensial, merupakan bagian dari proses politik, sebagai tuntutan-tuntutan publik terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan.

Pada gilirannya, implementasi dari suatu kebijakan pendidikan berdampak pada kehidupan politik. Berbagai kebijakan pendidikan berdampak langsung pada akses, minat dan kepentingan pendidikan para *stakeholder* pendidikan, terutama orangtua dan peserta didik serta masyarakat pada umumnya.

Implementasi kebijakan pendidikan memiliki berbagai konsekuensi politik dengan memengaruhi antara lain jenis dan jenjang pekerjaan, mobilitas sosial, dan ide-ide dan sikap-sikap masyarakat. Dinamika hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dalam suatu masyarakat terus meningkat, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Secara umum, signifikansi politik pendidikan dalam masyarakat kontemporer meningkat dengan derajat perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Perubahan-perubahan besar yang telah dialami oleh negara-negara berkembang dan perubahan-perubahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, yang sedang berproses, semuanya memperlihatkan hubungan timbalbalik antara politik dan pendidikan.

Penjelasan tersebut paling tidak menggambarkan tiga hal. *Pertama*, eratnya hubungan antara dunia pendidikan dan dunia politik. *Kedua*, besarnya pengaruh hubungan tersebut terhadap tatanan kehidupan sosial politik masyarakat. *Ketiga*, besarnya peran persekolahan modern dalam keruntuhan kolonialisme.

Bukti impresif tentang hubungan (antara pendidikan dan politik) dapat dilihat pada perjalanan negara-negara jajahan menuju kemerdekaan. Kontribusi pendidikan barat terhadap keterpurukan kolonialisme barat saat ini cukup dimengerti, paling tidak secara sistematis. Para penghancur kolonialisme adalah para pemimpin yang dididik oleh sekolah kolonial.

3. *Ide Non-Political School*

Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan.

Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Kecenderungan tersebut memuncak pada tahun 1970-an, khususnya di Amerika Serikat. Pada waktu itu ada keinginan untuk menciptakan dinding pemisah antara karakteristik sebuah sistem politik dengan kebijakan pendidikan. Kecenderungan itu berkaitan erat dengan ideologi dan praktik-praktik politik.

Di berbagai negara, ada beberapa ilmuwan pendidikan dan politik yang mengabaikan aspek-aspek politik dari pendidikan dan berpendapat bahwa pendidikan dan politik perlu

dipisahkan. Pandangan ini biasanya berangkat dari kekecewaan yang mendalam terhadap berbagai realitas politik, seperti praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh partai-partai politik pada akhir abad ke-19. Namun, karena minimnya kajian tentang persoalan ini, penjelasan tentang dasar-dasar pemisahan antara pendidikan dan politik di berbagai negara masih sulit ditemukan.

Apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik merupakan persoalan penting yang perlu dicermati, baik oleh ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan politik. Pemahaman terhadap karakteristik hubungan antara pendidikan dan politik adalah suatu prasyarat yang diperlukan untuk dapat memahami politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian akademik dan beberapa mitos yang mengitarinya.

Ide tentang *non-political school* di Amerika mula-mula dikembangkan dan disebarluaskan oleh para administrator sekolah dan para pendidik profesional yang ingin melindungi pendidikan publik dari politik lokal dan nasional Amerika awal abad ke-19 yang berwatak korup dan kejam. Para pendukung *non-*

political school yang kebanyakan terdiri dari para pelaksana dan praktisi pendidikan dengan sengaja menciptakan seperangkat mitos yang menggambarkan pendidikan sebagai suatu fungsi pemerintahan yang unik, yang harus dikeluarkan dari politik (*taken out of politics*) dan dijaga oleh para pendidik sebagai satu-satunya yang dapat mengamankan kepentingan publik.

Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja dan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas, serta berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumberdaya. Karena keduanya syarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua aktivitas yang akan terus terkait dan saling berinteraksi.

Lembaga-lembaga atau *agency* yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pada dua sektor kehidupan masyarakat ini akan saling memengaruhi, apapun karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh suatu

masyarakat. Hal ini terjadi dalam setiap masyarakat, apapun tingkat perkembangannya, sistem politiknya dan ideologinya.

3. Hambatan dunia pendidikan ke depan

Saat ini situasi dimana-mana sungguh berbeda. Konsep lama bahwa pendidikan tidak ada kaitan dengan politik (*apolitical*) sudah dilupakan dan teriakan bahwa pendidikan berada di luar politik sudah tidak terdengar lagi. Perubahan ini terjadi karena terutama karena terus meningkatnya politisasi terhadap pendidikan. Saat ini kebijakan pendidikan telah menjadi tema perdebatan publik dan kompetisi antar partai politik. Dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden, misalnya, pendidikan menjadi salah satu isu sentral dalam materi kampanye atau dalam rumusan visi dan misi para kandidat.

Berbagai isu tentang pendekatan pendidikan sering dipertarungkan di arena publik. Di mana-mana guru-guru telah tampil sebagai kelompok militan yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak mereka. Di Indonesia misalnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama masa orde baru menjadi “anak manis” penguasa, sekarang cukup kritis

terhadap berbagai kebijakan pendidikan di negeri ini, terutama kebijakan yang ada kaitannya dengan nasib dan profesi guru.

Perubahan pemahaman tentang hubungan politik dan pendidikan juga dipicu oleh hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peminat kajian politik pendidikan. Hasil-hasil tersebut telah turut meyakinkan para profesional pendidikan bahwa berbagai proses dan institusi pendidikan bersifat politik. Saat ini kita menyaksikan pengakuan yang luas di kalangan guru, administratur pendidikan, dan di kalangan masyarakat luas, bahwa tekanan-tekanan dan kekuatan politik sangat berpengaruh terhadap institusi dan kebijakan pendidikan.

Untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di tengah masyarakat tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang aspek-aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

4. Control Negara terhadap pendidikan

Kehidupan politik Indonesia saat ini cenderung materialistis. Uang dan jabatan menjadi motivasi dan tujuan akhir. Dalam pemilihan ketua partai

(kecuali sebagian kecil), bupati, gubernur, bahkan presiden uang menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Bukan ilmu, kapabilitas calon dan adab atau akhlak yang baik yang dimiliki sang calon.

Padahal ilmu dan adab pemimpin politik itu menjadi syarat utama dalam memimpin masyarakat. Ulama Melayu terkemuka, Syekh Ahmad al Fathani mencirikan sifat-sifat yang mesti dimiliki pemimpin politik. Diantaranya: sempurna anggota (indera), baik budi pekerti, baik kefahaman, cerdas/bijaksana, faham terhadap sekalian ilmu terutama ilmu berhitung dan ilmu tarikh, benar dalam perkataan dan menjauhkan kebohongan, elok perlakuan muamalat, berkelakuan yang lembut, dalam perjumpaan selalu memberikan kelapangan, tidak tamak pada makanan, minuman dan perkawinan, menjauhi bermain-main dalam segala urusan, mempunyai ketinggian himmah (cita-cita), bersungguh-sungguh pada membangun kerajaan, mencintai keadilan, benci kezaliman, mempunyai hati yang tabah dan berani dan mengetahui sekalian muslihat.”

Pentingnya ilmu politik ini, dikemukakannya oleh Imam Mawardi, pada bicara ilmu siasat (politik). Yaitu

ilmu memperbaiki rakyat dengan menunjukkan mereka itu kepada jalan yang melepaskan mereka itu daripada tiap-tiap kekeruhan pada dunia dan akherat, sehingga dengan demikian, maka hukumnya ilmu itu wajib atau fardhu kifayah.

Masalahnya, dalam ilmu politik sekuler saat ini, masalah akherat tidak dimasukkan sebagai urusan Negara. Akherat tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan politik dan inilah awal malapetaka politik di Indonesia dan Negeri-negeri Islam lainnya. Sehingga suap, ingkar janji, kebohongan, hasad, tamak, riya’ menjadi tontotan politik sehari-hari.

Padahal dahulu bila para ulama memberikan nasehat kepada raja atau sultan selalu diawali dengan nasehat agar para pemimpin itu mula-mula bertakwa kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan seterusnya. Dulu, dalam sejarah Islam, Jendral Abdullah bin Husain, ketika menasihati anaknya, maka dia menulis agar ingat kepada Allah SWT, ingat hari pembalasan, orang miskin dan sebagainya. Apakah ada jenderal sekarang ini yang menasihati anaknya demikian, Juga ketika khalifah Ali bin Abi Thalib menasihati kepada gubernurnya. Ia menasihatkan tentang pentingnya

ketakwaan kepada Allah SWT, perhatian kepada orang miskin, jangan terpengaruh godaan dunia dan lain-lain.

Sehingga ketika berbicara masalah control sebuah Negara terhadap pendidikan, tentunya persoalan ini dapat di petakan sebagai berikut:

1. Negara sebagai lembaga yang berwenang mutlak untuk menentukan arah pendidikan, sehingga dengan demikian control Negara terhadap pendidikan harus benar-benar demi kemajuan dan perkembangan Negara dimasa-masa yang akan datang,
2. Lembaga pendidikan selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, mereka harusnya melakukan konsolidasi dan komunikasi yang baik terhadap para pelaku dan penyelenggara Negara dalam memajukan kondisi pendidikan yang ada,
3. Adanya timbal balik yang positif antara lembaga pendidikan yang dicover oleh dinas pendidikan dan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan.

Penutup

Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi/ akidah Islam.

Secara pasti, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan SDM yang berkepribadian Islami, dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.

Dalam kerangka ini, diperlukan monitoring yang intensif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah (negara), terhadap perilaku peserta didik, sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi-konsepsi Islam berkenaan dengan kehidupan dan nilai-nilainya.

Rangkaian selanjutnya adalah tahap merealisasikannya sehingga dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi, dan berkesinambungan dengan tujuan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

al-Khalidi, Mahmud. 1996. *Hukm Islâm fî Ra'sumâliyyah*. Jordania: Maktabah al-Risalah Al-Haditsah.

al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyyah*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizhâm al-Islâm*. t.tp.: t.p.

Hizbut Tahrir Indonesia, *Bunga Rampai Syariat Islam*, Jakarta: HTI, 2010.

Lasch, Christophher, *The Culture of Narcissism*. New York: Warner Books, 1979.

Panduan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010.

Thompson, John B, *Studies in The Theory of Ideology*, London: Polity Press, 1984.